

**RINCIAN PERSYARATAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT PNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**1. Kenaikan Pangkat Struktural/Penyetaraan**

NO	JENIS BERKAS	KETERANGAN
1	Fotocopy sah Karpeg /KPE, SK CPNS, PNS ( <b>Bagi PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali</b> )	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
2	Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
3	Fotocopy sah SK Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) <b>seluruh pelantikan mulai dari nama jabatan yang tercantum di SK Pangkat Terakhir s/d sekarang</b>	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
4	Fotocopy sah SKP 2022	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
5	Fotocopy sah SKP 2023	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
6	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK Pelantikan, SPP, SPMT pelantikan atasan langsung kondisi sekarang	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
7	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung yang menandatangani SKP pada awal tahun (jika atasan yang menandatangani SKP awal tahun berbeda dengan akhir tahun)	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
8	Fotocopy Ijazah Terakhir dan transkrip nilai sesuai dengan pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir	Tanpa legalisir
9	Bagi PNS yang memiliki ijazah baru lampirkan Fotocopy Ijazah Baru, Transkrip nilai, Forlap dikti, Akreditasi Program studi, Surat Izin Belajar, dan Dokumen pemakaian gelar yang dikeluarkan oleh BKN	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
10	Fotocopy Sertifikat Ujian Dinas TK. II bagi pejabat yang akan naik Golongan IV/a dengan pendidikan terakhir S1/ D4	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
11	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir	Asli (tanda tangan Kepala OPD dan stempel basah)
12	Berkas disiapkan rangkap 1 (satu) dan dimasukkan dalam Map Warna <b>MERAH</b> di tulis Nama, NIP, OPD dan Nomor	
13	Seluruh berkas tersusun dalam map sesuai dengan urutan yang telah ditentukan	

**RINCIAN PERSYARATAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT PNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**2. Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu**

NO	JENIS BERKAS	KETERANGAN
1	Fotocopy sah Karpeg /KPE, SK CPNS, PNS ( <b>Bagi PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali</b> )	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
2	Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
3	Fotocopy SK Penempatan atau SK Mutasi antar OPD/antar instansi mulai dari tempat yang tertera di SK pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
4	Fotocopy sah SKP 2022	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
5	Fotocopy sah SKP 2023	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
6	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung kondisi sekarang	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
7	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung yang menandatangani SKP pada awal tahun (jika atasan yang menandatangani SKP awal tahun berbeda dengan akhir tahun)	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
8	Foto Copy SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional untuk kenaikan pangkat pertama kali	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
9	Fotocopy sah SK Jabatan Fungsional terakhir/SK Kenaikan Jabatan Fungsional, <b>Khusus Fungsional Guru yang TMT SK Kenaikan Pangkatnya sebelum 1 Oktober 2013 melampirkan SK inpassing Guru</b>	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
10	Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Induksi bagi Jabatan Fungsional Guru	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
11	Sertifikat Uji Kompetensi	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
12	STR bagi Jabatan Fungsional Kesehatan	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
13	Berita Acara Sumpah Jabatan bagi PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
14	Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi yang mengusulkan kenaikan pangkat pertama kali	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
15	<b>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pakai Matrai 10.000</b>	Asli (tanda tangan dan stempel basah)
16	Fotocopy Penilaian Angka Kredit (PAK) yang tertera di SK Pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
17	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Asli (tanda tangan dan stempel basah)
18	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Asli dan Bahan DUPAK (Semesteran)	Asli (tanda tangan dan stempel basah)
19	Daftar penilaian lainnya terkait PKG	Asli (tanda tangan dan stempel basah)
20	Bukti Fisik dan Softcopy (CD) Pengembangan Profesi	Asli (tanda tangan dan stempel basah)
21	Fotocopy Ijazah Terakhir dan transkrip nilai sesuai dengan pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir	Tanpa legalisir
22	Bagi PNS yang memiliki ijazah baru harus melampirkan Fotocopy Ijazah Baru, Transkrip nilai, Forlap dikti, Akreditasi Program studi, Surat Izin Belajar, dan Dokumen pemakaian gelar yang dikeluarkan oleh BKN	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
23	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir	Asli (tanda tangan Kepala OPD dan stempel basah)
24	Berkas disiapkan rangkap 1 (satu) dan dimasukkan dalam Map Warna <b>HIJAU</b> di tulis Nama, NIP, OPD dan Nomor	
25	Seluruh berkas tersusun dalam map sesuai dengan urutan yang telah ditentukan	

**RINCIAN PERSYARATAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT PNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**3. Kenaikan Pangkat Fungsional Umum/Pelaksana**

NO	JENIS BERKAS	KETERANGAN
1	Fotocopy sah Karpeg /KPE, SK CPNS, PNS ( <b>Bagi PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali</b> )	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
2	Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
3	Fotocopy SK Penempatan atau SK Mutasi antar OPD/antar instansi mulai dari tempat yang tertera di SK pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
4	Fotocopy sah SKP 2022	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
5	Fotocopy sah SKP 2023	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
6	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung kondisi sekarang	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
7	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung yang menandatangani SKP pada awal tahun (jika atasan yang menandatangani SKP awal tahun berbeda dengan akhir tahun)	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
8	Fotocopy Ijazah Terakhir dan transkrip nilai sesuai dengan pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir	Tanpa legalisir
9	Bagi PNS yang memiliki ijazah baru harus melampirkan Fotocopy Ijazah Baru, Transkrip nilai, Forlap dikti, Akreditasi Program studi, Surat Izin Belajar, dan Dokumen pemakaian gelar yang dikeluarkan oleh BKN	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
10	Fotocopy sah STLUD Tk. I bagi yang akan naik pangkat ke Golongan III/a dengan pendidikan terakhir SMA sederajat	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
11	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir	Asli (tanda tangan Kepala OPD dan stempel basah)
12	Berkas disiapkan rangkap 1 (satu) dan dimasukkan dalam Map Warna <b>KUNING</b> di tulis Nama, NIP, OPD dan Nomor	
13	Seluruh berkas tersusun dalam map sesuai dengan urutan yang telah ditentukan	

**RINCIAN PERSYARATAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT PNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

NO	JENIS BERKAS	KETERANGAN
1	Fotocopy sah Karpeg /KPE, SK CPNS, PNS ( <b>Bagi PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali</b> )	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
2	Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
3	Fotocopy SK Penempatan atau SK Mutasi antar OPD/antar instansi mulai dari tempat yang tertera di SK pangkat Terakhir	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
4	Fotocopy sah SKP 2022	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
5	Fotocopy sah SKP 2023	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
6	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung kondisi sekarang	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
7	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan, SPP, dan SPMT atasan langsung yang menandatangani SKP pada awal tahun (jika atasan yang menandatangani SKP awal tahun berbeda dengan akhir tahun)	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
8	Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir (Terbaru)	Dilegalisir oleh pejabat berwenang
9	Fotocopy sah Bukti Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAMPTKES saat Surat Izin Belajar/SK Tugas Belajar di tetapkan	Dilegalisir oleh pejabat berwenang
10	Fotocopy sah Forlap Dikti status mahasiswa dinyatakan lulus	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
11	Fotocopy sah Sertifikat STLUJUD Ujian Penyesuaian Ijazah	Dilegalisir oleh pejabat berwenang di OPD
12	Uraian Tugas	Asli (tanda tangan Kepala OPD dan stempel basah)
13	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir	Asli (tanda tangan Kepala OPD dan stempel basah)
14	Berkas disiapkan rangkap 1 (satu) dan dimasukkan dalam Map Warna <b>BIRU</b> di tulis Nama, NIP, OPD dan Nomor	
15	Seluruh berkas tersusun dalam map sesuai dengan urutan yang telah ditentukan	

CONTOH SURAT PERNYATAAN  
TENTANG TIDAK PERNAH DIJATUHI  
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/  
BERAT DALAM 2 TAHUN TERAKHIR

ANAK LAMPIRAN I-q KEPUTUSAN KEPALA

KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 12 TAHUN

TANGGAL : 17 Juni 2002

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dalam dua tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menganggung kerugian tersebut.

.....  
a.n MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/  
BUPATI/WALIKOTA .....

.....  
NIP.